



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8812-8823

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Sosialisasi Pemilu Oleh KPU Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres 2024 Di Kota Probolinggo

Siti Marwiyah^{1✉}, Eko Yudianto Yunus², Moch. Rizal³

Universitas Panca Marga

Email: Marwiyah@upm.ac.id^{1✉}

Abstrak

Salah satu komponen utama negeri demokrasi merupakan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkeinginan membuat melaksanakan pengecekan berkala terhadap lembaga demokrasi yang dicoba tiap Lima Tahun sekali. Van Meter dan Van Horn (2007) mencantumkan faktor-faktor berikut yang mempengaruhi implementasi: sumber daya; ukuran dan tujuan kebijakan; sikap dan kecenderungan pelaksana; kegiatan komunikasi dan implementasi antarorganisasi; dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dan Partisipasi Masyarakat menurut Ramlan Surbakti (2023), berpendapat bahwa partisipasi masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Dalam skripsi ini penulis berupaya meneliti tentang cara KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui program sosialisasi. Terdapat beberapa indikator dalam program implementasi sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU diantaranya: Pertama Ukuran & Tujuan Kebijakan, Kedua Sumber daya, Ketiga Karakteristik Agen Pelaksana, Keempat Sikap Kecenderungan Para Pelaksana, Kelima Komunikasi Antarorganisasi & Aktivitas Pelaksana, dan Keenam Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Pemilu, KPU, DKPP, Bawaslu*

Abstract

One of the main components of a democratic country is the General Election. The General Election Commission (KPU) wishes to carry out periodic checks on democratic institutions which are carried out every five years. Van Meter and Van Horn (2007) list the following factors that affect implementation: resources; policy size and objectives; implementers' attitudes and tendencies; interorganizational communication and implementation activities; and the economic, social, and political environment and Community Participation according to Ramlan Surbakti (2023), believes that community participation is divided into 2 (two) types, namely active participation and passive participation. In this thesis the author attempts to research how the KPU can increase public participation in elections through outreach programs. There are several indicators in the election socialization implementation program carried out by the KPU, including: First, Policy Size & Objectives, Second, Resources, Third, Characteristics of Implementing Agents, Fourth, Attitudes, Tendencies of Implementers, Fifth, Interorganizational Communication & Implementing Activities, and Sixth, Economic, Social and Environmental Environments. Political.

Keywords : *Socialization, Election, KPU, DKPP, Bawaslu*

PENDAHULUAN

Pemilu ialah salah satu wujud demokrasi Indonesia yang berbeda dengan wujud demokrasi yang lain, semacam demokrasi liberal serta kapitalis (Wardhana, 2020). Supaya penerapan pemilu berjalan dengan lancar, KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah melaksanakan aktivitas persiapan. Bersumber pada data yang dikumpulkan dari halaman formal KPU, ada 580 kursi Legislatif di tingkatan DPR, 2.372 di tingkatan provinsi, serta 17.510 di tingkatan Kabupaten maupun Kota. Sebanyak 20.462 kursi legislatif serta 2.710 Dapil (Wilayah Pemilihan) hendak dilibatkan pada pemilu 2024. Angka ini sangat mengesankan serta menyoroti kompleksnya demokrasi di suatu negeri. (KPU, 2023)

Salah satu komponen utama negeri demokrasi merupakan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkeinginan membuat melaksanakan pengecekan berkala terhadap lembaga demokrasi yang dicoba tiap Lima Tahun sekali. Perihal ini adalah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP), serta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Oleh karena itu, kegiatan ini berjalan sesuai dengan standar hukum dan praktik (langsung, umum, bebas, adil dan rahasia). (KPU, 2023)

Pada tahun 2014 ada 2 pendamping calon Presiden serta Wakil Presiden, ialah Prabowo Subianto-Ir. Hatta Rajasa (Pendamping Nomor Urut 1) serta Ir. Joko Widodo-Jusuf Kalla (Pendamping Nomor urut 2). Serta KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan perolehan suara ialah pendamping nomor urut 1 Prabowo-Hatta dengan perolehan suara 62.576.444 suara. Sebaliknya pendamping nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan suara 70.997.833 suara. Bila digabungkan jadi 133.574.277 suara yang dimenangkan oleh pendamping nomor urut 2 ialah Joko Widodo-Jusuf Kalla. (KPU.go.id)

Sebaliknya pada tahun 2019 ada 2 pendamping calon Presiden serta Wakilnya, ialah Ir. Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin (pendamping nomor urut 1) serta Prabowo-Sandiaga Uno (pendamping nomor urut 2). KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan hasil perolehan suara ialah pendamping nomor urut 1 Ir. Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 84.654.894 suara sebaliknya pendamping nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno mendapatkan suara sebanyak 68.359.086 suara. Sehingga bila digabungkan jadi 153.013.980 suara yang dimenangkan oleh pendamping nomor urut 1 ialah Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin. (KPU.go.id)

Pasangan pertama: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan kedua: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, serta pasangan ketiga: Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Masing-masing merupakan tiga calon presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil yang ditetapkan oleh KPU pada 19 Oktober - 25 November 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih aktif untuk Pemilu 2024, dengan jumlah DPT final yang ditetapkan adalah 178.502 pemilih aktif. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kademangan misalnya, menyebutkan 32.830 pemilih aktif, dengan 384 pemilih baru. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Wonoasih menyampaikan 26.167 pemilih aktif, dengan 22 pemilih baru. Lalu, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Mayangan menyampaikan 47.331 pemilih aktif dengan 245 pemilih baru. Selanjutnya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Mayangan menyampaikan 45.299 pemilih aktif dengan 10 pemilih baru. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kedopok menyampaikan 27.550 pemilih aktif dengan 14 pemilih baru.

Dengan pemilih aktif di Kelurahan Jrebeng Kulon yaitu 2.158 Jiwa Laki-laki dan 2.223 Jiwa Perempuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Pasangan nomor urut 2 sebagai Presiden dan Wakilnya Yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meskipun hasilnya sudah dibujuk ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan dugaan adanya kecurangan. (KPU Kota Probolinggo.go.id)

Oleh sebab itu, sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik itu sangat penting bagi masyarakat. Apalagi sekarang jamannya penyalahgunaan etika berpolitik, banyak masyarakat yang terjerumus akan berita yang tidak sesuai dengan fakta dari setiap calon presiden dan wakilnya. Sehingga mengakibatkan kerugian suara bagi paslon yang lain, serta suara dinilai tidak jujur, bebas, adil, dan rahasia. Merujuk pada latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian: "Implementasi Sosialisasi Pemilu Oleh KPU Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam PILPRES 2024 Di Kota Probolinggo".

METODE PENELITIAN

Informasi yang muncul atau disampaikan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan naratif, dan gambar disebut dengan informasi penelitian kualitatif. Informasi tersebut bersifat kualitatif (Sutama, 2016), Penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan-temuan yang sederhana atau besar, sederhana atau rumit, dan berkaitan dengan satu atau lebih kejadian. Jika dianalisis dari sudut pandang eksplanasi, penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yaitu representasi lingkungan sosial yang diteliti secara merata dan transparan. Penelitian ini juga dapat membandingkan peristiwa-peristiwa yang berbeda dari satu situasi sosial dengan situasi sosial lainnya, atau dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Serta dapat membentuk pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek lainnya dan itu dapat menghasilkan hipotesis dan teori.

Dalam hal menghasilkan teori atau aturan, penelitian kualitatif memberikan hasil terbaik sedangkan penelitian deskriptif menghasilkan yang terendah. Untuk mencapai tujuan penelitian, data yang lebih komprehensif, handal, signifikan, dan lengkap akan dikumpulkan

melalui penggunaan metodologi kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bukan merupakan pendekatan yang lebih baru dan “trendi” sehingga pendekatan ini digunakan; sebaliknya, ini lebih cocok digunakan ketika mengumpulkan data mengenai kesulitan. Proses kualitatif sangat kredibel karena menghasilkan data yang lebih lengkap.

Penelitian ini berfokus pada upaya KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden 2024 di Desa Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Penulis menggunakan teori Van Meter dan van Horn (2007) yang menggambarkan implementasi kebijakan sebagai proses kolaboratif yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini tidak hanya mencakup penyesuaian yang signifikan dan minor yang diperlukan oleh keputusan kebijakan, tetapi juga penerjemahan keputusan tersebut menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas tujuan dan signifikansinya bagi pembaca, dengan fokus pada aspek-aspek utama berikut:

A. Implementasi yang meliputi 6 (Enam) variabel menurut Van Meter dan Van Horn (2007) yaitu Ukuran & Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Kecenderungan para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi & Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, & Politik.

B. Partisipasi Masyarakat : Ramlan Surbakti (2023), berpendapat bahwa partisipasi masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang beralamatkan di Gg. II No 96, Krajan, Pabean, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo. Kantor Komisi Pemilihan Umum ini merupakan pusat kantor KPU yang berada di daerah Probolinggo serta memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membangun dan menyadarkan masyarakat dalam upaya mempertinggi kualitas partisipasi politik. Dalam hal ini peneliti diperkenankan melakukan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum selama Bulan Juni 2024 hingga Juli 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pada tahapan ini diuraikan tentang sosialisasi pemilu dan Informasi yang muncul atau disampaikan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan naratif, dan gambar disebut dengan informasi penelitian kualitatif. Informasi tersebut bersifat kualitatif (Sutama, 2016) Penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan-temuan yang sederhana atau besar, sederhana atau rumit, dan berkaitan dengan satu atau lebih kejadian. Jika dianalisis dari sudut pandang eksplanasi, penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yaitu representasi lingkungan sosial yang diteliti secara merata dan transparan. Penelitian ini juga dapat membandingkan peristiwa-peristiwa yang berbeda dari satu situasi sosial dengan situasi sosial lainnya, atau dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Serta dapat membentuk pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek lainnya dan itu dapat menghasilkan hipotesis dan teori. Dalam hal menghasilkan teori atau aturan, penelitian kualitatif memberikan hasil terbaik sedangkan penelitian deskriptif menghasilkan yang terendah.

Dalam skripsi ini penulis berupaya meneliti tentang cara KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui program sosialisasi, sesuai dengan judul pada skripsi ini, yaitu Implementasi sosialisasi pemilu oleh KPU sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilpres 2024 di Kota Probolinggo. berdasarkan temuan observasi dan wawancara terhadap program sosialisasi pemilu, KPU untuk mengetahui apa saja yang masih dianggap kurang dalam pelaksanaannya. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana program ini tepat, efisien, dan efektif. Dari sini, berkembang suatu keadaan yang memungkinkan munculnya rincian mengenai bidang-bidang yang perlu ditingkatkan program sosialisasinya.

1. Ukuran & Tujuan Kebijakan

Penerapan kebijakan mungkin tidak akan berhasil jika orang-orang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap tujuan kebijakan tersebut. Variabel ini didasarkan pada betapa pentingnya menilai kinerja kebijakan. Menganalisis implementasi kebijakan

memerlukan identifikasi indikator kinerja terlebih dahulu. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur seberapa baik tujuan dan langkah-langkah dasar kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, ketika ruang lingkup dan tujuan suatu kebijakan bertentangan dengan norma sosiokultural masyarakat, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lain dan yang lebih buruk lagi ketidakmampuan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. Selain itu, agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan, kebijakan tersebut harus memiliki tujuan kebijakan yang dapat diukur. Akan terdapat beragam penafsiran dan kemungkinan besar terjadinya konflik antar lembaga pelaksana jika tujuan kebijakan tidak jelas. Tujuan utama KPU dalam merancang kebijakan sosialisasi pemilu yaitu edukasi. Jadi ada 3 (tiga) faktor edukasi yaitu To Educate (untuk memberikan edukasi kepada pemilih), To Inform (untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu), To Political Awareness (untuk meningkatkan ketertarikan atau kesadaran masyarakat dalam mengikuti pemilu). KPU juga mempunyai tahap sosialisasi dari hulu ke hilir (masyarakat bawah ke atas) dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dampak sosialisasi pemilu terhadap peningkatan tingkat kehadiran pemilih melalui terukurnya jumlah masyarakat yang hadir ke TPS.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan untuk beberapa tahapan guna menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Namun, sulit untuk mengantisipasi kinerja kebijakan jika sumber daya tersebut tidak memiliki kualifikasi atau keahlian. Selain sumber daya manusia, sumber daya lain seperti sumber daya keuangan dan waktu perlu diperhitungkan. Untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak terhambat oleh tantangan pendanaan infrastruktur dan fasilitas, sumber daya keuangan digunakan sebagai dukungan selama proses berlangsung. Sementara itu, sumber daya waktu digunakan sebagai pengingat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan manusia berfungsi dengan baik dan meningkatkan efisiensi sepanjang tahap implementasi.

Sumber daya berperan penting dalam implementasi kebijakan dan program, bahkan

rencana yang telah disusun dengan baik cenderung sulit diterapkan jika tidak ada dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang memadai diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Jumlah personal yang berperan sebagai pelaksana dengan pengetahuan yang memadai, akses terhadap informasi, dan fasilitas lainnya disebut sebagai sumber daya. Salah satu sarana KPU dalam menjalani program sosialisasi kepada masyarakat yaitu media sosial. Seperti FB (Facebook), Twitter/X, IG (Instagram), TikTok, Dan Youtube. Karena media sosial cukup efektif dari sisi kegiatan dan anggaran. Dan yang terpenting adalah kekreativitasan dalam membuat konten sehingga penyampaian informasi cukup jelas. Kecuali dalam personil KPU mempunyai HUBNAS, KPU juga mempunyai infrastruktur seperti podcast sebagai salah satu metode sosialisasi melalui media sosial. Strategi utama KPU yaitu melakukan feedback terhadap masyarakat. Atau memanfaatkan sumber daya dalam melakukan sosialisasi. Diantaranya dengan menyampaikan sosialisasi melalui tatap muka maupun melalui perangkat elektronik. Unsur dari tatap muka yaitu dialog, seminar, pemanfaatan seni budaya, dll.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kelompok formal dan informal yang melaksanakan implementasi kebijakan publik termasuk dalam fokus agen pelaksana. Hal ini penting karena atribut yang sesuai dan konsisten dengan agen pelaksana mempunyai dampak besar terhadap seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan. Ketika memilih agen pelaksana, jangkauan pelaksanaan kebijakan juga harus diperhitungkan. Jumlah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan meningkat seiring dengan jangkauannya. Dalam variabel ini penulis dapat mengetahui tentang cara KPU untuk memotivasi masyarakat dalam sosialisasi. Serta mengetahui KPU dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu untuk mencegah money politik dan memastikan keamanan selama proses pemilu. KPU melakukan tingkatan yang berkaitan kompetensi yaitu sosialisasi terhadap seluruh tugas anggota KPU. Selain itu, KPU juga melakukan bimbingan teknis serta melakukan kiat sukses timbal balik. Dan dari kegiatan tersebut tidak hanya peningkatan kompetensi tapi juga memberikan motivasi

kepada mereka untuk membandingkan pola sosialisasi yang sama terhadap masyarakat kabupaten atau kota yang lain. Terutama secara aksesibilitas geografis jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Artinya mereka yang dalam posisi mampu untuk menjalankan sosialisasi harus menggunakan media yang telah disediakan semaksimal mungkin. Pada saat mendekati jadwal pencoblosan, KPU menyampaikan kepada pelaksana kampanye untuk tidak mempengaruhi masyarakat dengan cara yang tidak benar. Seperti, intimidasi, melarang masyarakat untuk datang ke TPS, dan memasang alat kampanye di TPS.

4. Sikap Kecendrungan Para Pelaksana

Berhasil tidaknya suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh sikap diterima atau ditolaknya pelaksana kebijakan tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pihak-pihak yang terkena dampak langsung dari permasalahan tersebut tidak merumuskan kebijakan yang diambil. Pendapat mereka tentang suatu kebijakan dan bagaimana mereka memandang dampaknya terhadap kepentingan pribadi dan organisasi membentuk sikap mereka. Van Meter dan Van Horn membaca disposisi yang mengatakan bahwa langkah pertama dalam implementasi suatu kebijakan adalah menyaring pendapat para pelaksana mengenai batasan-batasan yang harus dipenuhi. Ada tiga aspek respons pelaksana kebijakan yang berbeda yaitu kognisi (pengetahuan dan pemahaman) mengenai kebijakan, jenis respons (menerima, menolak, atau netral), dan intensitas terhadap kebijakan yang dapat memengaruhi kapasitas dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan. Dari variabel ini dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi sudah melebihi target yang telah ditentukan. Kecendrungan para pemilih pemula terhadap pemilu berjumlah sedikit. Namun KPU masih berupaya untuk mencegah menurunnya angka partisipasi masyarakat terhadap pemilu. KPU mencegah kecendrungan para pemilih pemula dalam money politik dengan cara edukasi. Karena calon yang menyalurkan money politik cenderung memikirkan bagaimana modal tersebut akan balik. Sehingga program yang beliau janjikan kepada masyarakat tidak maksimal. Sejauh ini KPU tidak menerima tantangan terhadap sosialisasi terkait kecendrungan para pelaksana pemilih. Bahkan KPU dibantu oleh pemerintah, parpol, dan masyarakat.

5. Komunikasi Antarorganisasi & Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan kunci implementasi pencapaian kebijakan. Koordinasi diyakini merupakan faktor dan prasyarat utama yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan sebaliknya, bergantung pada seberapa baik semua agen pelaksana berkoordinasi dan melakukan konsumsi. Informasi yang dikirimkan kepada pelaksana dari berbagai sumber perlu dikomunikasikan secara konsisten dan seragam. Mencapai tujuan kebijakan itu sendiri akan menjadi tantangan jika standar dan tujuannya tidak jelas, konsisten, dan selaras. Para pelaksana dapat memahami apa yang diminta dari mereka dan apa yang perlu dilakukan karena kejelasan ini. Dalam variabel ini KPU berencana untuk berkolaborasi dengan organisasi dan lembaga lain dalam menyusun strategi sosialisasi pemilu. Serta membuat strategi konkret untuk melibatkan para pelaksana pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu. KPU menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ketika mendekati pemilu. Kegiatan yang dilakukan KPU secara konkret adalah sosialisasi pemilu, rapat koordinasi, rapat intertainmen, dan kirab pemilu. Dan juga mengkoordinasi dengan organisasi masyarakat, seperti organisasi agama, non pemerintah, kemahasiswaan, dan pelajar. KPU melibatkan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi pemilu.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sejauh mana lingkungan eksternal juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik harus diperhitungkan ketika mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan publik. Iklim sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan seberapa kondusif lingkungan eksternal saat menerapkan kebijakan. Tujuan adanya program ini yaitu memberikan informasi terkait pemilu kepada para pelaksana pemilih agar mereka tidak dibodohi akan money politik. Dalam hal ini program sosialisasi pemilu sudah dianggap cukup sesuai dengan target yang telah ditentukan. Karena adanya program ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Meskipun upaya dari KPU untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat cukup jelas, tetapi masih banyak para pelaksana pemilih yang masih belum paham akan money politik. Karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui cara mengakses informasi yang lebih praktis dan lengkap. Oleh karena itu, KPU mendatangi masyarakat tersebut untuk melakukan sosialisasi secara lisan. Atau ikut serta dalam kegiatan mereka dan membagikan brosur sosialisasi.

SIMPULAN

Terdapat beberapa indikator dalam program implementasi sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU diantaranya: Pertama Ukuran & Tujuan Kebijakan, dimana dalam hal ini dapat mengetahui proses penyampaian informasi sosialisasi dengan sasaran yang dituju, serta sudah tercapai atau tidak sasaran dalam program ini. Kedua Sumber daya, terkait pemanfaatan media sosial dari adanya program ini. Ketiga Karakteristik Agen Pelaksana yaitu cara untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan sosialisasi pemilu melalui organisasi masyarakat. Keempat Sikap Kecenderungan Para Pelaksana, yaitu sebuah prosedur yang diberikan untuk mengetahui ketidakpentingnya money politik. Kelima Komunikasi Antarorganisasi & Aktivitas Pelaksana, KPU berencana untuk berkolaborasi dengan organisasi dan lembaga lain dalam menyusun strategi sosialisasi pemilu. Keenam Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan partisipasi masyarakat melalui bidang Ekonomi, Sosial, Dan Politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Pemilu Di Indonesia. (N.D.). Google Books.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=labaeaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=pengertian+pemilu&ots=mhstcmucmk&sig=eyr4ptqk37ihci3hfdtzehulcti&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pemilu&f=false
- Suryadinata, R., Izzati Maulani, D., Nurjannah, L., & Studi Ilmu Pemerintahan, P. (2023). *Sosialisasi Pemahaman Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Bagi Pemilih Pemula*

- Understanding Socialization General Election (Election) 2024 For Beginners Vote.* 1(3).
- Maranda, H. (N.D.). *Teori Dan Model Implementasi Kebijakan Publik.*
<https://www.researchgate.net/publication/326405219>
- Margareta, S., Meiliana, E., Wijaya, C., Cendana, C., Meriyani, S., Rika Variyani, J., Yunita, R., Syafrida, Y., Monica, S., Selvi Moron, M., Juliana, E., Sisilia, D., & Agatha, S. (N.D.). *Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipatif Siswa Pada Pemilu 2024 Di Smak Yos Sudarso Batam.* 5. <https://doi.org/10.37253/nacospro.v5i1.8353>
- Islah, K., Sulaeman Nasim, E., Ilmu Administrasi, F., & Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami, I. (2020). *Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok.* In *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Rahma Bachtiar, F. (N.D.). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi* 1.
http://sites.harvard.edu/fs/docs/lcb.topic925740.files/week%206/mainwaring_latin.pdf
- Tua Mulia Raja Panjaitan, D., Piki Darma Kristian Pardede, M., & Msi, Ss. (N.D.). *Administrasi Publik* Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.
- Darmanto, D., & M Ed. (N.D.). *Pengertian Administrasi.*
- Sarna, K., Ketut, I., Putu, S., Tanaya, E., & Wairocana, G. N. (N.D.). *Diktat Ilmu Administrasi Negara.*
- Kharisma, D. (N.D.). *Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda 1.*
- Besar, G. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib.* In *Haedar Akib/Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 1).
- Tanjung*, A., Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik.* *Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545–551. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>